

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA MENURUT EKONOMI ISLAM

Wandha Audia Magfirah¹, M. Askari Zakariah², Ristiyanti Ahmadul Marunta³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah Kolaka

Email: wandhaaudiaa@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id²,
ristiyanti@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya menekankan aspek kebersamaan, tetapi juga membutuhkan penerapan tata kelola yang baik melalui *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan GCG pada koperasi sangat penting untuk memastikan pengelolaan berjalan profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis domain untuk menemukan pola penerapan GCG serta kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Transparansi telah dijalankan melalui keterbukaan laporan keuangan, laporan triwulanan, dan pertanggungjawaban dalam RAT, sesuai dengan nilai kejujuran dalam Islam. Akuntabilitas diterapkan melalui struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pengawasan internal-eksternal, sejalan dengan prinsip *al-Mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Responsibilitas tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan). Independensi diwujudkan melalui pengambilan keputusan berbasis musyawarah, mencerminkan prinsip *wasathiyah* (keseimbangan). Keadilan diterapkan melalui pembagian SHU yang proporsional dan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota, sesuai dengan prinsip *al-'adl* (keadilan). Selain itu, koperasi juga mengamalkan prinsip *al-Kifayah* (kecukupan) dengan menyediakan kebutuhan dasar anggota serta prinsip *maslahah* melalui unit simpan pinjam dan toko koperasi. Faktor pendukung penerapan GCG meliputi keterbukaan pengurus, kepercayaan anggota, mekanisme musyawarah, serta

dukungan regulasi pemerintah. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman prinsip tata kelola Islami, terbatasnya inovasi usaha, praktik pinjaman berbunga, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Kesejahteraan Anggota, Ekonomi Islam, Koperasi.

PENDAHULUAN

Dalam era *modern* saat ini, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan penting bagi setiap jenis usaha, tanpa memandang skala atau bentuknya. Setiap organisasi memerlukan penerapan prinsip GCG, meskipun pendekatan implementasinya bisa berbeda-beda tergantung pada karakteristik masing-masing bisnis. GCG berkaitan erat dengan pembagian tanggung jawab dan kewenangan, penerapan prinsip akuntabilitas, serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.¹

Istilah "tata kelola perusahaan" didefinisikan oleh OECD sebagai "sistem peraturan yang menetapkan hak dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan satu sama lain," termasuk pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Tujuan utama dari GCG adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui manajemen, regulasi, dan pengendalian bisnis yang lebih baik. Pada awal kemunculan GCG, beberapa pihak berharap bahwa GCG dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.²

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan untuk menciptakan sistem manajerial yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Penerapan GCG telah menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin keberlanjutan organisasi, tidak hanya pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi

¹ Juliana Nasution, dkk, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. II, Nomor. 2, 2022, hlm. 2541-2542.

² Ayu Ribus Sri Wahyuni Ningseh, "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia", *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*, Vol. V, Nomor 2, 2021, hlm. 19.

juga pada lembaga keuangan mikro seperti koperasi. Dalam konteks koperasi, penerapan prinsip GCG menjadi semakin penting mengingat koperasi mengelola dana anggota dan bertumpu pada asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Secara teoritis koperasi memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi keunggulan sebagai badan usaha yang dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ideal sebagai badan usaha. Koperasi juga memiliki keunggulan potensial yang bisa menjadikannya efisien, posisi tawar yang kuat, pasar yang lebih pasti, sehingga koperasi memiliki keunggulan bersaing yang lebih baik dibandingkan dengan usaha sendiri-sendiri. Namun demikian faktanya terdapat koperasi yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Koperasi yang berhasil tentunya koperasi yang mampu memberikan manfaat kepada anggotanya. Manfaat koperasi tersebut meliputi manfaat ekonomi dan non ekonomi.³

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar asas kekeluargaan.⁴ Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.⁵

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka adalah karena koperasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Koperasi ini berada dalam lingkup dan naungan Komando Distrik Militer (Kodim) 1412 Kolaka, di mana keanggotaan

³ Ryan Irwansyah Pasaribu dan Kusmilawaty, “Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan)”, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, Vol. II, Nomor 02, 2024, hlm. 359.

⁴ Veronika Chantika Da Gomez, dkk, “Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi Dalam Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat Pada KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Koting”, *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, Vol. V, Nomor 02, 2024, hlm. 1212.

⁵ Aathifah Fauziyyah, dkk, “Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha”, *Musyteri : Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol 3, Nomor 04, 2023, hlm. 2.

koperasi terbatas hanya pada personel Kodim 1412 Kolaka dan tidak melibatkan masyarakat umum sebagai anggota. Kondisi ini menjadikan koperasi tersebut unik dalam hal struktur keanggotaan, pengelolaan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dengan mengangkat judul tentang : Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka).

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan teknik kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif seringkali menggunakan pendekatan induktif dan bersifat deskriptif. Fokus dalam penelitian kualitatif terutama pada proses dan makna (dari sudut pandang subjek) Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian kualitatif, dimana peneliti ingin mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menurut ekonomi Islam pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan koperasi. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini berupaya menggali makna di balik tindakan, interaksi, serta proses penerapan prinsip-prinsip GCG dalam praktik pengelolaan koperasi.⁶ Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena tertentu secara kontekstual dalam lingkup program, peristiwa, proses, institusi, maupun kelompok sosial. Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran yang luas dan mendalam mengenai bagaimana penerapan tata kelola koperasi yang baik dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota Menurut Ekonomi Islam Pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka

⁶ Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), hlm. 31.

Dalam perkembangannya, tata kelola saat ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan umum, tetapi juga untuk perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali. Perusahaan keuangan terdiri atas perusahaan perbankan dan non-bank. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi merupakan lembaga keuangan non-bank yang penting dan memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan serta penggelapan dana masyarakat.⁷

Hal ini disebabkan karena koperasi merupakan lembaga dengan jumlah pemilik modal yang cukup banyak, yaitu seluruh anggotanya, sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Koperasi mengelola barang publik dan sumber daya bersama, sehingga tata kelola yang baik sangat penting untuk diterapkan. Koperasi juga memiliki keunggulan dibandingkan lembaga keuangan lainnya, karena koperasi memiliki model bisnis yang adil dan inklusif yang mampu bertahan menghadapi perubahan kondisi ekonomi global.⁸

1. Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, serta beberapa anggota koperasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka sudah cukup baik. Setiap laporan keuangan dipaparkan secara resmi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan satu kali setahun, sementara laporan perkembangan keuangan disampaikan secara triwulanan maupun bulanan kepada pengurus inti sebagai bentuk kontrol internal. Informasi yang disampaikan tidak hanya sebatas laporan keuangan, tetapi juga mencakup kebijakan koperasi, perkembangan usaha, serta informasi penting lainnya yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh anggota. Bahkan, informasi sering disampaikan melalui forum apel rutin sehingga seluruh anggota memperoleh pemahaman yang sama. Dari sisi pengawas, keterbukaan informasi dinilai cukup memadai meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kecepatan dan detail laporan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diupayakan, dan anggota merasa tidak pernah

⁷ Novia Rizki, dkk, "Good corporate governance in cooperatives organization: Lesson learn from Indonesia", *New Applied Studies in Management, Economics & Accounting*, Vol. VII, No. 1, 2024, hlm. 56.

⁸ *Ibid.*

kekurangan informasi mengenai pengelolaan koperasi.

2. Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas tercermin dari adanya mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada anggota melalui RAT. Pengurus menyampaikan laporan menyeluruh mengenai kegiatan operasional, keuangan, maupun kebijakan koperasi selama periode berjalan. Evaluasi dilakukan secara langsung oleh anggota melalui forum RAT, dan setiap kritik atau saran dicatat serta ditindaklanjuti dalam rapat pengurus. Selain itu, koperasi rutin diaudit baik oleh pengawas internal maupun auditor eksternal dari Dinas Koperasi. Berdasarkan keterangan ketua koperasi, sejauh ini tidak pernah ditemukan indikasi penyimpangan atau penyelewengan dana, bahkan koperasi pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka karena dinilai sehat. Hal ini menandakan bahwa pengurus telah menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan amanah anggota serta menjaga kepercayaan melalui sistem akuntabilitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Responsibilitas

Indikator responsibilitas menunjukkan bagaimana koperasi melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjalankan usaha sesuai aturan hukum dan kebutuhan anggota. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus koperasi menegaskan bahwa mereka selalu berpedoman pada peraturan Puskopad Hasanuddin dan Undang-Undang Perkoperasian. Namun, dari perspektif syariah, koperasi ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi Islam karena masih terdapat bunga sebesar 0,9% yang disepakati oleh anggota dalam sistem pinjaman. Meski demikian, koperasi tetap berusaha menjalankan prinsip tanggung jawab sosial dengan mengedepankan efisiensi penggunaan dana dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan anggota. Selain itu, koperasi memberikan pelatihan atau pembekalan secara rutin melalui Dinas Koperasi maupun Puskopad Hasanuddin, agar pengurus lebih memahami tata kelola usaha sesuai aturan yang berlaku. Di samping itu, koperasi juga memiliki program sosial berupa santunan bagi anggota yang sakit atau meninggal serta pemberian THR sembako setiap

menjelang hari raya, yang mencerminkan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anggota.

4. Independensi

Prinsip independensi di koperasi ini terwujud dalam mekanisme pengambilan keputusan yang selalu dilakukan melalui musyawarah anggota dalam RAT, tanpa adanya intervensi pihak luar. Semua narasumber, baik pengurus maupun anggota, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, karena keputusan selalu berdasarkan aturan dan hasil musyawarah bersama. Struktur organisasi koperasi yang jelas juga mendukung pengambilan keputusan secara mandiri, di mana masing-masing pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Dari sisi pengawas, pelaksanaan fungsi kontrol dapat dilakukan dengan objektif tanpa tekanan, sehingga memastikan setiap keputusan benar-benar mengutamakan kepentingan anggota. Dengan demikian, koperasi ini relatif berhasil menjaga independensi dalam tata kelola organisasinya.

5. Keadilan

Aspek keadilan tercermin dari mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan secara adil berdasarkan tingkat partisipasi anggota. Semakin besar kontribusi anggota, baik melalui simpanan maupun transaksi di toko koperasi, maka semakin besar pula bagian SHU yang diterima. Sebaliknya, anggota yang tidak aktif tidak mendapatkan SHU. Semua narasumber menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota tertentu, baik berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Keadilan juga terlihat dalam akses layanan koperasi, di mana seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas simpan pinjam maupun belanja di toko koperasi. Keputusan yang diambil dalam RAT juga menjamin bahwa setiap suara anggota memiliki nilai yang sama, sehingga prinsip demokrasi dan keadilan benar-benar berjalan dalam koperasi ini.

6. Perspektif Ekonomi Islam

Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, tata kelola koperasi ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena koperasi tidak memiliki

forum khusus untuk membahas kesesuaian operasional dengan syariat Islam, karena koperasi ini berstatus konvensional di bawah komando Puskopad. Namun demikian, koperasi tetap menunjukkan beberapa nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti prinsip efisiensi, hidup sederhana, kepedulian sosial, serta pembagian SHU berdasarkan kontribusi anggota yang mencerminkan keadilan. Program sosial berupa santunan dan pemberian THR sembako juga mencerminkan nilai solidaritas yang sejalan dengan semangat zakat, infaq, dan sedekah meskipun tidak disebut secara eksplisit. Pandangan pengurus terhadap ekonomi Islam pada dasarnya netral, namun mereka menyatakan siap menyesuaikan jika suatu saat regulasi mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam koperasi.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang memperkuat tata kelola organisasi. Dari sisi kelembagaan, koperasi ini berada di bawah naungan Puskopad Hasanuddin sehingga memiliki aturan dasar serta pedoman kerja yang jelas. Keberadaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan struktur organisasi yang tertata juga menjadi landasan penting bagi pengurus dalam mengelola koperasi secara terarah. Selain itu, partisipasi anggota turut menjadi penopang utama. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun forum musyawarah, di mana saran, kritik, dan masukan dari anggota tidak hanya didengar tetapi juga ditindaklanjuti oleh pengurus. Sistem akuntabilitas pun terbangun dengan baik melalui RAT tahunan, audit internal dari pengawas, dan audit eksternal oleh Dinas Koperasi yang menjamin keterbukaan serta pertanggungjawaban pengurus. Tidak hanya itu, koperasi juga menjalankan program sosial seperti pemberian santunan kepada anggota yang sakit atau meninggal serta pembagian THR sembako menjelang hari raya. Program-program ini menunjukkan adanya kepedulian

terhadap kesejahteraan anggota, sehingga semakin memperkuat penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam tata kelola koperasi.

Meskipun demikian, penerapan GCG masih menghadapi sejumlah hambatan. Dari sisi kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, koperasi ini belum sepenuhnya berbasis syariah. Ketiadaan akad-akad syariah seperti *murabahah* atau *mudharabah* serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur penerapan koperasi syariah menjadi penghalang bagi perwujudan tata kelola yang sesuai dengan nilai Islam. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, sebab tidak semua pengurus memahami prinsip-prinsip GCG secara mendalam maupun konsep ekonomi Islam secara utuh.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Hambatan lain datang dari aspek administrasi dan teknologi, di mana pencatatan keuangan serta laporan masih dilakukan secara manual sehingga rawan keterlambatan dalam distribusi informasi dan mengurangi efektivitas transparansi. Partisipasi anggota juga belum merata, karena masih terdapat sebagian anggota yang kurang aktif dalam mengikuti RAT atau tidak memanfaatkan layanan koperasi secara optimal. Hal ini berdampak pada efektivitas penerapan prinsip demokrasi dalam koperasi.

Keberadaan faktor pendukung menunjukkan bahwa koperasi memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menerapkan GCG. Namun, faktor penghambat mengindikasikan adanya kebutuhan akan transformasi, khususnya dalam penerapan prinsip syariah, penguatan kapasitas SDM, modernisasi administrasi berbasis teknologi, dan peningkatan partisipasi anggota.

Jika faktor-faktor penghambat ini dapat diatasi, maka koperasi tidak hanya akan mampu mempertahankan penerapan GCG, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas tata kelola yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan utama koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka berjalan baik jika didukung oleh regulasi, partisipasi anggota, sistem pengawasan, dan program kesejahteraan. Namun, untuk mencapai penerapan GCG yang optimal, koperasi perlu mengatasi hambatan yang ada, termasuk memperkuat penerapan prinsip syariah, meningkatkan pemahaman anggota terhadap GCG, memanfaatkan teknologi secara maksimal, dan mendorong partisipasi anggota yang lebih merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mewujudkan kesejahteraan anggota menurut ekonomi Islam studi kasus pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi telah diterapkan dengan baik, dibuktikan melalui keterbukaan laporan keuangan, laporan triwulanan, serta penyampaian pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam perspektif Islam, transparansi mencerminkan nilai kejujuran dan kebenaran yang mencegah terjadinya penipuan, manipulasi, dan informasi yang merugikan anggota.
2. Prinsip Akuntabilitas diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang teratur, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-Mas'uliyah* (pertanggungjawaban) dalam Islam, yang menegaskan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab tidak hanya kepada anggota, tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Prinsip Responsibilitas tercermin dalam kepatuhan koperasi terhadap regulasi pemerintah, aturan perkoperasian, serta tanggung jawab sosial terhadap

anggota. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), yaitu memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari sekadar memenuhi kewajiban formal.

4. Prinsip Independensi dilaksanakan melalui pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi pihak luar. Musyawarah anggota menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan koperasi. Perspektif Islam menekankan pentingnya *wasathiyah* (keseimbangan dan moderasi), yakni mengambil keputusan secara adil, tidak berat sebelah, dan tetap menjaga kemaslahatan bersama.
5. Prinsip Keadilan diwujudkan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang proporsional sesuai partisipasi anggota, serta kesempatan yang sama bagi seluruh anggota. Dalam ekonomi Islam, keadilan (*al-'adl*) adalah prinsip fundamental yang menghindarkan anggota dari kezaliman, memastikan hak-hak terpenuhi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Selain kelima prinsip GCG, dari perspektif Islam juga tampak bahwa koperasi berupaya menjalankan prinsip *al-Kifayah* (kecukupan) dengan menyediakan kebutuhan dasar anggota melalui unit usaha koperasi. Prinsip manfaat (*maslahah*) juga terwujud melalui kegiatan simpan pinjam dan toko koperasi yang membantu anggota. Dengan demikian, penerapan GCG di Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka tidak hanya memenuhi standar tata kelola modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Islam. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola yang baik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh, meliputi aspek material, sosial, dan spiritual.

Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka, terdapat sejumlah faktor yang mendukung sekaligus menghambat keberhasilannya. Faktor pendukung yang

paling menonjol adalah keterbukaan dan kepercayaan antara pengurus dengan anggota. Hal ini tampak dari keteraturan penyampaian laporan keuangan serta pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi. Selain itu, komitmen pengurus yang melaksanakan tugas sesuai struktur organisasi serta pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah juga menjadi modal penting bagi terjaganya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Faktor pendukung lainnya datang dari regulasi pemerintah yang memberi pedoman jelas dalam pengelolaan koperasi, serta adanya solidaritas dan kebersamaan antaranggota yang mendorong terwujudnya keseimbangan kepentingan individu dan kolektif.

Namun, penerapan prinsip-prinsip GCG di koperasi ini tidak lepas dari berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman mendalam mengenai manajemen modern dan prinsip tata kelola Islami, sering kali menjadi kendala. Di samping itu, koperasi masih menghadapi keterbatasan dalam inovasi usaha karena aktivitas ekonomi lebih banyak berfokus pada unit simpan pinjam dan toko, sehingga potensi peningkatan kesejahteraan anggota belum optimal. Hambatan lain yang muncul adalah sistem pinjaman berbunga yang, meskipun relatif lebih rendah dibanding lembaga keuangan konvensional, masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri, karena transparansi dan penyebaran informasi belum dapat menjangkau semua anggota secara merata, khususnya mereka yang tidak selalu hadir dalam RAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Juliana, dkk. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. II. Nomor. 2. 2022.
- Ningseh, Ayu Ribut Sri Wahyuni. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia". *Margin Eco: Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*. Vol. V. Nomor 2. 2021.

- Pasaribu, Ryan Irwansyah dan Kusmilawaty. “Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan)”. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*. Vol. II. Nomor 02. 2024.
- Gomez, Veronika Chantika Da, dkk. “Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi Dalam Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat Pada KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Koting”. *BUDGETING : Journal of Business. Management and Accounting*. Vol. V. Nomor 02. 2024.
- Fauziyyah, Aathifah, dkk. “Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha”. *Musytari : Neraca Manajemen. Ekonomi*. Vol 3. Nomor 04. 2023.
- Haryoko, Sapto, dkk. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Rizki, Novia, dkk. “Good corporate governance in cooperatives organization: Lesson learn from Indonesia”. *New Applied Studies in Management, Economics & Accounting*. Vol. VII. No. 1. 2024.